

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI
PROGRAM KARTU PRA KERJA DI KECAMATAN MEDAN
DENAI KOTA MEDAN**

**(Evaluasi Perpres No.76 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 Tentang
Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu
Pra Kerja)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-
1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh:

DINDA SITI RACHMAH

NIM. 0203171008



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441 H

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRA KERJA DI KECAMATAN MEDAN
DENAI KOTA MEDAN**

**(Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.
36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra
Kerja)**

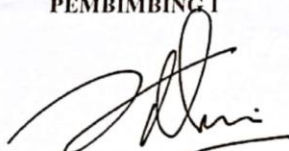
OLEH :

DINDA SITI RACHMAH

NIM. 0203171008

Menyetujui

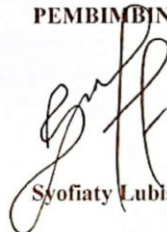
PEMBIMBING I



Dr. Adhlin Budhiawan SH. M.Hum

Nip. 198205102009011014

PEMBIMBING II



Syofiaty Lubis, MH

Nip. 197401272009012002

Mengetahui

Kerala Jurusan Siyasah



Dr. Irwansyah, M.H

Nip. 198010112014111002

PENGESAHAN

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRA KERJA DI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN (Evaluasi Perpres No.76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINDA SITI RACHMAH

Nim : 0203171008

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Judul Skripsi : **TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM PRA KERJA DI KECAMATAN MEDAN DENAI** (Evaluasi Perpres No.76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya di sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 26 Agustus 2021

Dinda Siti Rachmah

IKHTISAR

Dinda Siti Rachmah, 0203171008, judul : TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kartu pra kerja, tentang pengembangan Kompetensi kerja melalui program kartu pra kerja di Kecamatan Medan Denai di Kota Medan, yang mana kebijakan Kartu Pra Kerja sudah dianggap tidak efektif khususnya Di Kecamatan Medan Denai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana seadanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kartu Pra Kerja dilaksanakan dengan baik, masyarakat mengetahui bagaimana persyaratan dan proses pendaftaran Program Pra Kerja, Efektifitas bagi masyarakat belum dikatakan efektif dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Pengawasan yang dilakukan Pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan belum dilaksanakan secara langsung dan maksimal serta dampak yang dirasakan dari Program Kartu Pra Kerja sangat signifikan dan membantu perekonomian masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Masyarakat berharap program ini tetap lanjut dan lebih baik lagi kedepannya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt. Karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadiahkan akal dan pikiran bagi manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang.

Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRA KERJA DI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja.”

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di UIN-SU. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ada orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibunda Nurhamsyah S.pd yang sangat penulis cintai, dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1).
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negari Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN-SU).
4. Bapak Dr. Irwansyah, MH sekalu ketua jurusan Siyasah dab Ibunda Syofiaty Lubis , S.H, M.H selaku sekretaris jurusan Siyasah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Ramdani, M.H selaku dosen Penasehat.

Akademik dan Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Adlin Budhiawan, SH.Mhum dan Pembimbing Skripsi II Ibunda Syofiaty Lubis, MH. Karena kesabaran kedua beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama masih kuliah ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulisan selama masih kuliah.
7. Saudara kandung Adik, Fachriza Fadhillah dan Muhammad Rsyied Habib yang selalu menyayangi penulis.
8. Abangda Rajab yang selalu memberi nasehat dan membimbing penulis sampai selesainya Skripsi ini.
9. Sahabat saya Sonia Ayustina yang memberi arahan kepada penulis sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhususnya Support System yang selalu menemani penulis dari awal pembuatan skripsi hingga selesai, orang yang paling berpengaruh dalam skripsi yaitu Trisna Arjuna Rinaldi.
11. Seluruh Narasumber yang disertakan dalam penelitian skripsi ini dan yang telah memberikan informasi serta data-data kepada penulis.
12. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu, atas motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Medan, 26 Agustus 2021

Dinda Siti Rachmah

Nim. 0203171008

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
IKHTISAR	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat penelitian.....	
E. Tinjauan Pustaka.....	
F. Kerangka Teoritis.....	
G. Metode Penelitian.....	
H. Sistematika Pembahasan.....	
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Definisi Tinjauan.....	
B. Pelaksanaan.....	
C. Pengembangan Kompetensi Kerja.....	
D. Evaluasi.....	
E. Kartu Pra Kerja.....	
BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kota Medan.....	
B. Letak Geografis Kota Medan.....	
C. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Denai.....	
D. Keadaan Geografis Kecamatan Medan Denai.....	
E. Demografi Kecamatan Medan Denai.....	
F. Visi Dan Misi	

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Agar Bisa Mendapatkan/
Terdaftar Dalam Program Kartu Pra Kerja.....
- B. Bagaimana Efektifitas Bagi Masyarakat yang Sudah Mendapatkan
Program Kartu Pra Kerja.....
- C. Bagaimana Pengawasan Pemerintah (Dinas Ketenagakerja) Terhadap
Masyarakat yang Telah Mendapatkan Program Kartu Pra Kerja.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang melanda Indonesia di tahun 2020 ini menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan. Berdasarkan informasi dari Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mencatat 1,6 juta pekerja Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan sebagai dampak ekonomi pandemi virus corona.¹ Hasil Survei SMRC menyatakan 77 persen warga menilai virus corona atau Covid-19 telah mengancam penghasilan mereka. Pandemi itu membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam dan tabungan berkurang hanya cukup beberapa minggu. Namun sekitar 23 persen mengatakan Covid-19 tidak mengancam penghasilan.² Selain itu Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat akibat pandemi virus Covid-19. Sementara 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jumlah ini pun diprediksi dapat akan terus bertambah. Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah sudah memberi beberapa kebijakan khusus program Kartu Prakerja.

¹ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-493002/corona-total-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan>. di akses pada hari senin tanggal 22 Februari 2020 Pukul 15.40 WIB

² Lihat <https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-77-warga-menilai-corona-ancam-penghasilan/5376217.html> di akses pada hari senin tanggal 22 Februari 2020 Pukul 15.55 WIB

Permasalahan yang ada di Indonesia salah satunya yaitu pengangguran. Pengangguran di Indonesia merupakan permasalahan yang serius dan harus dihadapi Negara. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Sumatera Utara pada Januari 2020 sebanyak 4,73 persen, Kota Medan sebanyak 64,89 persen dan Indonesia pada Februari 2020 jumlah penduduk bekerja sebanyak 131,03 juta orang, sedangkan jumlah orang menganggur sebanyak 6,88 juta orang. Hal ini dialami negara Indonesia sebelum adanya pandemi global Covid-19, yang juga melanda negara-negara lain, dapat diperkirakan selama dan beberapa bulan setelah pandemi, angka pengangguran di Indonesia bertambah drastis. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian sehingga mengharuskan mereka mengulangkan atau mem-PHK karyawannya dengan gulung tikar.

Dengan bertambah bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ini, maka pemerintah membuat suatu upaya untuk mengurangi pengangguran tersebut, dengan membuat program Kartu Pra-Kerja dengan dikeluarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja.

Berdasarkan web resmi www.prakerja.go.id, Kartu Pra-Kerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program Kartu Pra-Kerja. Program kartu Pra-Kerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan /atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Kartu Prakerja merupakan program andalan Joko Widodo yang di tinjau untuk mengurangi pengangguran dan mewujudkan keadilan sosial.³ Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012, insentif dan pelatihan yang di

³. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47520226> di akses pada hari senin tanggal 22 Februari 2020 pukul 13.19 WIB.

berikan melalui program Kartu Prakerja merupakan salah satu bentuk jaminan sosial. Menurut PP No.39 Tahun 2012 jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Program Prakerja secara spesifik diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.

Program ini merupakan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan nilai kepada pengguna dan juga memberikan nilai kepada sektor swasta. Ada 8 mitra platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemegang kartu Pra-Kerja, yaitu Tokopedia, Skill Academy Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir dan Kemnaker.go.id. Dengan mengikuti program ini, para pemegang Kartu Pra-Kerja akan mendapatkan bantuan biaya atau insentif dengan total Rp.3.550.000 dengan rincian 3 kali kursus, untuk antuan manfaat yang dibagi 4 bulan dan insentif pengisian survei yang dibagi 3 kali pencairan. Pelatihan ini dilakukan secara online.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan menyatakan bahwasanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu pemberhentian tenaga kerja dalam beberapa hal memiliki akibat terhadap suatu hak dan kewajiban yang telah berakhir yang di miliki para pekerja pada awalnya, Hal ini terjadi bisa karena perusahaan mengalami kebangkrutan, pengurangan tenaga kerja, habis kontrak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi diantaranya ialah:

- a) Tenaga Kerja wafat
- b) Waktu perjanjian kerja yang telah disepakati jangkanya telah berakhir.
- c) Pengadilan telah memutuskan dan menetapkan terkait lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan dari hubungan kerja industrial yang sudah memiliki berkekuatan hukum tetap
- d) Terjadinya suatu kejadian diluar perkiraannya sehingga mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan dalam kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Harianto Butarbutar mengatakan, Kartu :Prakerja merupakan program dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yan berdampak dari wabah virus corona. Pemerintah memprioritaskan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan sedikitnya 6.000 orang, yang terdiri dari 4.000 pekerja hotel dan restoran dan 2.000 pekerja industri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan jumlah masyarakat kota medan yang telah mendaftar Program Kartu Pra-Kerja dari gelombang 1 hingga 6 sebanyak 14.569 orang. Pada tanggal 03 April 2020, sebanyak 5073 orang warga Kota Medan dan 33 orang mantan Pekerja Migran Indonesia yang baru saja pulang ke Kota Medan, sehingga sejumlah 5106 data. Dan pada tanggal 09 April 2020, sebanyak 9463 data orang. Kemudian, data dari

laporan Program Kartu Pra-Kerja 2020, menyatakan bahwa Program Kartu Pra Kerja sebanyak 251,1 orang dan dengan menjangkau peserta di 514 Kabupaten/Kota dari gelombang 1-11 sebanyak 5.509.005 orang (tidak termasuk) 478.619 orang yang dicabut kepesertaannya sesuai aturan), sedangkan pendaftar Kartu Pra-Kerja sebanyak 43,8 Juta orang.

Dalam menjalankan program ini, muncul suatu kendala atau permasalahan yang terjadi seperti kurang minat peserta pemegang Kartu Pra-Kerja dalam mengikuti pelatihan, insentif yang keluar tidak tepat waktu sesuai yang dijanjikan oleh pemerintah, pelatihan yang tidak sesuai dengan kompetensi peserta, pelatihan yang terlalu monoton, terjadinya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh peserta pelatihan dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Pra-Kerja.

Kebijakan Kartu Prakerja sudah dianggap tidak efektif khususnya Di Kecamatan Medan Denai, dikarenakan pemerintah kurang matang dalam mempersiapkan pada penguatan mekanisme *basis data* atau data base penerima pada target yang dituju. Kurang memperhatikan kemampuan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital, dan juga beberapa fasilitas/sarana dan prasarana penunjang seperti laptop dan ponsel pintar yang tidak semua masyarakat mempunyai sarana elektronik tersebut. Beberapa permasalahan manajemen kebijakan kartu Prakerja.

- a. Pertama, orang yang tidak mengalami PHK bisa mendaftar sebagai peserta kartu Prakerja. Pemerintah harus bekerja sama dengan para asosiasi

pengusaha dikarenakan terdapat data yang jelas terkait penerima akan lebih tepat sasaran, namun sisi lain Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksanaan Prakerja, Panji Winanteya Ruky lebih memilih menggunakan sistem acak dan sekaligus untuk mengantisipasi bias subjektif.⁴ Sistem acak yang dilakukan justru akan menimbulkan ketidakadilan oleh pekerja yang terdampak COVID-19.

- b. Kedua, disaat wabah pandemi COVID-19 seperti pada saat ini pendaftaran kartu Prakerja dilakukan secara daring/online dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit. Namun, kenyataan yang dilapangan masih ada beberapa pekerja/buruh korban PHK yang sulit dalam melakukan pendaftaran online dikarenakan tidak melek teknologi.
- c. Ketiga, permasalahan yang muncul selanjutnya pada program kartu prakerja adalah sarana akses internet dari setiap kelompok masyarakat yang berbeda.

Hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Pemerintah mempunyai peran penting untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan program Kartu Pra-Kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan

⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4993042/peserta-kartu-pra-kerja-dipilih-acak-yakin-tepat-sasaran>. diakses pada hari Selasa Tanggal 23 Februari 2020 Pukul 14.14 WIB

penduduk atas barang, jasa dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ **Tinjauan Terhadap Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-Kerja di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Evaluasi Perpres No.76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja**”

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Agar bisa Mendapatkan/ Terdaftar Dalam Program Kartu Pra Kerja ?
2. Bagaimana Efektifitas bagi masyarakat yang sudah mendapatkan Program Kartu Pra Kerja?
3. Bagaimana Pengawasan Pemerintah (Dinas Ketenagakerja) Terhadap Masyarakat yang Telah Mendapatkan Program Kartu Pra Kerja ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme dan Pelaksanaan Agar bisa Mendapatkan/ Terdaftar Dalam Program Kartu Pra Kerja

2. Untuk mengetahui Efektivitas Bagi Masyarakat Yang Sudah Mendapatkan program Kartu Pra-Kerja
3. Untuk Mengetahui Pengawasan Pemerintah (Dinas Ketenagakerja) Terhadap Masyarakat Yang telah Mendapatkan program Kartu Pra-Kerja

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai:

- a) Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu agama dan hukum bagi para akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumy, khususnya mahasiswa dibidang Siyasah dalam kaitannya dengan tinjauan fiqih siyasah itu sendiri.
- b) Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji Undang-undang serta praktek penerapan Undang-undang dan aturan lainnya.dalam rangka penegakan hukum siyasah syariah, Untuk memperoleh manfaat bagi penulis itu sendiri. sebagai ilmu yang telah dipelajari dan hasil dalam penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi teman-teman dan pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi thesis Karya Kudadiri, Karina Riska, (2020), tentang “*Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang Penyajian*

Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM (studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Medan Tembung)". Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pembahasan mengenai skripsi thesis diatas mengenai persepsi pengelola usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tentang penyajian laporan keuangan berbasis SAK EMKM dan faktor-faktor penyebab rendahnya persepsi pengelola UMKM tentang penyajian laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Medan Tembung tidak menguasai akuntansi, dan tidak menerapkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dalam usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengelola UMKM dengan kriteria tidak baik/rendah.

Adapun faktor-faktor penyebab persepsi pengelola UMKM yang masih tidak baik/rendah dikarenakan pelaku UMKM belum memahami akuntansi dalam menjalankan usahanya, minimnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan akuntansi seperti pencatatan dalam buku besar, jurnal dan pembuatan laporan keuangan. Penyebab lainnya yaitu pelaku UMKM belum mengerti tentang pentingnya laporan keuangan dalam menjalankan usaha dan UMKM belum mengetahui sepenuhnya tentang SAK EMKM.

Kedua, Skripsi Karya Chusnul Qatimah Nita Petmata, (2020). tentang "*Analisis kebijakan Kartu Pra Kerja terhadap pekerja yang di PHK untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia*". Universitas Negeri Semarang

Pembahasan mengenai skripsi diatas adalah tentang pemerintah bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi pekerja dengan mengeluarkan kebijakan Kartu Pra Kerja. Dimana salah satu kegunaan kartu prakerja bisa dimanfaatkan oleh pekerja yang terkena PHK dari perusahaan. Pekerja tersebut dapat mendaftar dan melalui beberapa tahapan akan diseleksi oleh petugas, penyeleksian ini berguna untuk kevalidan data yang masuk serta data yang akan menerima Kartu Pra Kerja. pemerintah menginginkan adanya kartu pra kerja dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, melalui Kartu prakerja ini Jokowi berharap bahwasanya dengan peluncuran kebijakan ini dapat menghasilkan adanya reformasi sistem yang memungkinkan orang yang mencari pekerjaan dan para pemilik kartu yang dicanangkan yaitu Kartu Prakerja bisa memiliki secara langsung pelatihan melalui platform digital, sehingga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia.

Ketiga, Skripsi karya Nurfitriyana, (2011). tentang *“Efektifitas Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK) pada Dinas kerja Kota Makasar”* Universitas Hasanuddin.

Pembahasan mengenai skripsi di atas adalah permasalahan penelitian yang diajukan sebagai Efektifitas dari proses pendekatan yang dilihat dari beberapa indikator yaitu :

- a. Efisiensi pelayanan, sudah berjalan dengan baik akan tetapi perlu adanya pembaharuan tentang penginformasian syarat-syarat agar dapat menunjang penyelesaian waktu pelayanan yang sesuai dengan SOP.

- b. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, semangat kerjasama dalam Dinas Tenaga Kerja baik itu antara pimpinan serta staf sudah dikatakan baik karena mereka menjunjung rasa kekeluargaan tanpa harus menimbulkan sifat yang monoton.
- c. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan, belum diterapkan dan hal ini juga yang bisa menjung tidak terjadinya keefektifak dalam pelayanan, karena tidak adanya pendelegasian wewenang dalam keadaan darurat dan dengan hal inilah yang memungkinkan masyarakat sering mengeluh dalam menerima pelayanan.
- d. Hubungan pimpinan dan bawahan, berjalan dengan baik harmonisasi dan komuniokainya berjalan dengan baik.
- e. Adanya usaha dari individu maupun organisasi dalam pencapaian tujuan, disisn belum adanya usaha yang muncul baik itu berupa kelebihan ataupun jiwa kreatif yang dimiliki dengan pencapaian tujuan.

F. Kerangka Teoritis

Pada kerangka teoritis yang merumuskan teori pengamatan pada penelitian ini adalah. Menggunakan teori pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik pengamatan yang digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan atas perubahan tersebut.

Teori adalah seperangkat dalil mengenai hubungan antara berbagai konsep. Dalam penelitian kualitatif, teori yang sudah ada memiliki kegunaan yang cukup penting. teori dalam penelitian kualitatif ini digunakan secara lebih longgar, teori memungkinkan dan membantu untuk memahami apa yang sudah diketahui secara intuitif pada saat pertama, tetapi bersifat jamak untuk berubah sebagaimana teori sosial berubah, pada umumnya teori bagi penelitian kualitatif berguna sebagai sumber.

Pada kerangka teoritis adalah suatu model konseptual yang menggambar bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui. Dalam hal ini menggunakan teori pengamatan yang mana hal ini sangat penting dalam suatu masalah tertentu, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang diteliti. pengamatan yang dilakukan pada sebuah efektivitas sangat diperlukan dalam penelitian ini. Sebuah kerangka teoritis yang meyakinkan dibangun berdasarkan argumentasi yang disusun dalam teori-teori yang dipergunakan dalam membangun kerangka berfikir.

G. Metode Penelitian dan Pengelolaan Data

Metode penelitian adalah satu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh dan membahas penelitian tersebut maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis penelitian

- 1) Penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal atau dalam bahasa lain Normatif.⁵ Dimana, jenis penelitian ini mengacu kepada persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum khususnya terdapat dalam Peranan Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui program kartu prakerja dalam masa pandemi covid-19 (Studi analisis perpres No 76 Tahun 2020 di Kota Medan dalam tinjauan Fiqih siyasah).
- 2) Penelitian Hukum non doktrinal atau bahasa lain empiris (lapangan) adalah penelitian secara sosiologi sebagai suatu gejala empiris yang diamati dalam kehidupan.⁶

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan gabungan antara normatis dan empiris, dimana konsespnnya secara pustaka dan sosiologis.

2. Jenis data dan sumber penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal yaitu kata-kata dan tindakan, foto, sumber tertulis dan datastatistic.⁷ Penelitian ini penulis mengambil data primer dan skunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara secara langsung dalam pihak terkait. Untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

b. Sumber data sekunder

⁵ Watni Marpaung, *Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Prena Damedia Group 2016). Hlm. 39

⁶ Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU , *Metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Menulis Skripsi* (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN- Sumatera Utara, 2017). Hlm:10

⁷ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017). Hlm: 157

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Penelitian Pustaka (Library Research) Penelitian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara (interview)

Yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau responden untuk memberikan informasi atas pengamatan dan pengalaman dalam menganalisis penerapan aturan hukum.

c. Observasi

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.⁸ Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah ketentuan perundang-undangan tentang pemilu.

4. Analisis Data

Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah ketentuan perundang-undangan tentang Peranan Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui program

⁸ Rianto Adi , *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit ,2010),Hlm 56

kartu prakerja dalam masa pandemi covid-19 (Studi analisis perpres No 76 Tahun 2020 di Kota Medan dalam tinjauan Fiqih siyasah) kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Maka penulis melakukan pembagian dengan menggunakan sistematika pembahasan, yakni menjelaskan beberapa uraian sebagai perinciannya, maka dari itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang landasan teori, bab ini meliputi Tinjauan, Evaluasi, pengertian evaluasi, macam-macam evaluasi, pelaksanaan, pengertian perpres, pengembangan, kompetensi , dan pra kerja.

Bab III Merupakan hasil dari penelitian yang berisi tinjauan umum Pelaksanaan perpres N0.76 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program pra kerja di kec. Medan Denai kota Medan dan gambaran lokasi penelitian.

Bab IV pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang akan dituangkan sesuai dengan penelitian yang berlangsung.

Bab V Penutup dalam bab ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, kaporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut.

B. Pelaksanaan

a. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan melaksanakansuatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap

siap.⁹ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usahayang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan diterapkan dan dilengkapi segera kebutuhan , alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakanditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategi maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:¹⁰

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan dimana tempatnya dan kapan waktunya dimulainya.
- b) Menurut Bintoto Tjokroadmudjyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berwal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.
- c) Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan

⁹ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2505936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 22 juni 2021 pukul 12:13

¹⁰ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (yogyakarta; Graha Ilmu) h.34

sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis

- d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang direncanakan.

Fungsi Pelaksanaan adalah:

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan.
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

C. Pengembangan Kompetensi Kerja

a. Pengembangan

Pengembangan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis. Tujuan pengembangan adalah peningkatan tingkat dan kualitas hidup penduduk dan penciptaan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan.

Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada.¹¹ Dalam melaksanakan penelitian pengembangan, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif, metode evaluatif, metode eksperimental.¹²

1. Jenis-Jenis Pengembangan

Jenis pengembangan dikelompokkan atas pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal.

- a) Pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena prestasi kerja karyawan semakin besar, disamping efisiensi dan produktifitasnya juga semakin baik.
- b) Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal dilakukan perusahaan karena

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), h.164

¹² Endang Mulyaningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: ALFABETA, 2011), h167

tuntutan pekerjaan saat ini ataupun masadatang, yang sifatnya nonkarir atau peningkatan karier seseorang karyawan.

b. Kompetensi

Menurut estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan keterampilan dan sikap kerja. Sehingga dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang diterapkan.

Definisi Kompetensi menurut Depdikbud (1994) adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang merefleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan.¹³ Menurut UU no. 13/tahun 2003 tentang ketenagakerjaan: pasal 1(10), “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.”

¹³ Chandra Herry Pintardi *Faktor-faktor Strategi Positioning Dalam Pemasaran Realestat* (Surabaya: Graha Ilmu 1998) h. 76

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus yang memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap dasar untuk melakukan sesuatu, kebiasaan berfikir dan bertindak itu didasari oleh budi pekerti luhur baik dalam kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan, keberagamaan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kompetensi di bagi menjadi 2 kategori yaitu :

1. Kompetensi inti atau Dasar, yaitu kompetensi minimal yang mutlak dimiliki oleh pelaku profesi dan
2. Kompetensi Tambahan atau lanjutan yaitu pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendukung tuntutan/kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis serta perkembangan IPTEK.

Tipe Karakteristik Kompetensi.

1. Motif-motif (motives) sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan diinginkan, yang menyebabkan tindakan seseorang.
2. ciri-ciri (traits) karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri (self-concept) sikap-sikap nilai-nilai atau gambaran tentang diri sendiri seseorang.
4. Pengetahuan (knowledge), informasi yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu.

5. Keterampilan (skill), kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik atau tugas mental tertentu.

c. Kerja

Keberhasilan atau pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya yaitu bahan pokok perlatan gedung, tenaga kerja, mesin dan modal yang secara garis besar dapat ditegorikan menjadi input manusia dan non manusia.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁵

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun.

1.Klasifikasi Kerja

¹⁴ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, (Jakarta: Erlangga,2009), h.213

¹⁵ Sendjun H, Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) ,h.3

Untuk menentukan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi, yaitu :

- a) Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun yang data disebut dengan penduduk usia kerja.
- b) Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela). penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja. Perbandingan diantara angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja.¹⁶

D. Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Kata evaluasi sering digunakan dalam pendidikan. Dalam konteks ini, evaluasi berarti penilaian atau pengukuran. Namun, banyak dari kita yang belum memahami secara tepat arti kata evaluasi, pengukuran, dan penilaian. bahkan banyak orang mengartikan ketiganya dengan satu pengertian yang sama. Hal ini karena orang hanya mengidentikkan kegiatan evaluasi sama dengan menilai. Karena biasanya, aktivitas mengukur sudah termasuk di dalamnya, Pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara berurutan.

¹⁶ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013), h.18

Pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematis. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik suatu objek. Selain itu, pengukuran juga pada dasarnya merupakan kuantifikasi suatu objek atau gejala. Semua gejala atau objek dinyatakan dalam bentuk angka atau skor dan objek diukur bisa berupa fisik maupun non fisik.¹⁷

Atau dengan kata lain, pengukuran dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas tertentu. Dalam pengukuran harus menggunakan alat ukur (tes atau non-tes). Alat ukur tersebut harus memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Dalam bidang pendidikan, psikologi, maupun variabel-variabel sosial lainnya, kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih lanjut bahwa evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu. Baik yang menyangkut nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai atau arti itu adalah evaluasi, membahas evaluasi berarti mempelajari bagaimana proses pemberian pertimbangan mengenai kualitas sesuatu.

b. Model Evaluasi

1. Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi CIPP, karena model ini merupakan model evaluasi yang dilakukan secara kompleks,

¹⁷ Djemari Mardapi, *Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), h.7

¹⁸ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), cet Ke-4 h.4

CIPP dianggap sebagai model evaluasi yang paling tepat dalam memberikan pertimbangan ketika akan membuat sesuatu kebijakan atau program, suatu program akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Pada Model CIPP evaluator tidak harus terlibat langsung dalam program yang akan dievaluasi, tetapi dapat bekerja sama dengan salah satu orang yang terlibat langsung dalam program yang akan dievaluasi. Perlu adanya kerjasama yang baik dengan para pelaku dalam program yang akan dievaluasi diharapkan akan dapat menggali informasi dan mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Sehingga dengan adanya kerjasama yang berjalan dengan baik, maka informasi yang diperoleh untuk menghasilkan data akan maksimal.

2. Model Evaluasi EPIC Robert L. Hammond

Model Evaluasi Program for Innovative Curriculum (EPIC) yang dikembangkan oleh Robert L. Hammond, model evaluasi ini sangat berpengaruh dibidangnya dan seringkali mengadvokasi serta menjadi konselor bagi guru dan pekerja lainnya yang terlibat dalam pendidikan .

Ada lima langkah menurut Dr. Hammond untuk menganalisa dan mengevaluasi kurikulum, *pertama*: memilih dan mengisolasi bagian kurikulum yang akan dievaluasi, *kedua*: mendefinisikan variabel-variabel deskriptif (semua variabel yang berkaitan dengan sekolah dan tujuannya, *ketiga* : menetapkan hasil belajar yang diinginkan, *keempat*: menilai hasil belajar, *kelima*: analisis hasil dengan membuat kesimpulan terhadap suatu program.

Syaodih mengatakan, “model EPIC” menggambarkan keseluruhan program evaluasi dalam sebuah kubus”.¹⁹ kubus ini digunakan untuk menjelaskan lima langkah dalam evaluasi kurikulum.

3. Model Discrepancy provus

Sebagai salah satu tokoh penelitian evaluasi. Malcolm Provous dikenal sebagai direktur penelitian pada sekolah umum. Pandangannya tentang evaluasi disusun dalam sebuah buku yang berjudul *Disperancy Evaluation*.²⁰ konsep dasar dari model ini adalah: 1) *Standard(S/C); a description of how something should be*, 2) *Performance(P); proceed of find out wheteher they actually are that way*, 3) *Discrepancy; evaluation as being a matter of making judgment about worth or adequacy of an object base upon D information beteen Sand P*.

Evaluator memulai evalasi kurikulum tahap pertama dengan cara membandingkan antara standar yang telah ditetapkan sebagai desain dari program. Kenyataan adalah “P” atau performance dan “C” adalah standar yang ditetapkan. “D” akan terlihat dengan jelas bagaimana bias atau kesenjangan antara kenyataan di lapangan dan standar yang ditetapkan. informasi adanya kesenjangan menjadi data untuk mengambil keputusan apakah penelitian dilanjutkan pada tahap berikutnya.

4. Model Countenance Stake

Model ini Countence Stake dikembangkan pada tahun 1975 dan merupakan model evaluasi kurikulum pertama yang diperkenalkan olehnya. Sebagai model evaluasi diartikan sebagai keseluruhan kegiatan evaluasi itu

¹⁹ Laurie Brady, *Curriculum Development* (Sydney: Prentice Hall, 1990),h.174.

²⁰ Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011),h.58.

dilakukan. Menurut evaluasi menekankan kepada dua hal yaitu deskripsi dan pengamatan atau observasi.

Dengan adanya deskripsi dan pengamatan, model yang diajukan oleh Stake pada model countenance terdiri dari dua matriks. Matriks pertama dinamakan deskripsi (*description*) dan kedua disebut matriks pertimbangan (*judgment*). Pada matriks pertimbangan terdapat dua kategori yaitu standar dan pertimbangan. Untuk menghubungkan kedua matriks tersebut terdapat tiga kategorisasi yaitu antiseden, transaksi, dan *outcome*.

5. Model Black Box

Embrio model evaluasi kurikulum Black Box diawali dari beberapa tulisan lepas dari Tyler tentang pendidikan. Tyler mengatakan bahwa di dalam konteks pengembangan kurikulum, ada empat pertanyaan mendasar yaitu, pertama; tujuan belajar yang diinginkan dan diharapkan, kedua; pengalaman belajar apa yang mungkin diperoleh untuk mencapai tujuan pendidikan, ketiga; bagaimana cara mengorganisasi pengalaman belajar, dan keempat; bagaimana kita mengetahui apakah tujuan belajar sudah tercapai. Keempat komponen ini merupakan inti dari proses kurikulum yaitu: tujuan, konten metode dan evaluasi.²¹

E. Kartu Pra Kerja

1. Pengertian Kartu Pra Kerja

²¹ S. Hamid Hassan, *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) h.34

Menurut Perpres Nomor 76 tahun 2020, kartu prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program Kartu Prakerja.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan dilansir dari prakerja.go.id, kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan.

Jadi penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kartu prakerja merupakan suatu identitas yang diberikan kepada seorang yang telah resmi terdaftar sebagai calon peserta program kartu prakerja yang dibuat oleh pemerintah. Guna untuk masyarakat yang ingin meningkatkan keahliannya dengan mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh kementerian ketenagakerjaan.

2. Tujuan Kartu Pra Kerja

Program kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari kerja, namun juga untuk pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk merespon dampak dari Covid-19, Program kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.

3. Syarat Kartu Pra Kerja

Adapun syarat dalam mengikuti kartu prakerja yaitu :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Berusia 18 tahun ke atas
- c) Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
- d) Bukan Pejabat Negara Yaitu :
 - 1. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 2. Aparatur Sipil Negara
 - 3. prajurit Tentara Nasional Indonesia
 - 4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5. Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 6. Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

4. Solusi Proram Kartu Pra Kerja

- a) Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan
- b) Mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan
- c) Mendorong kebermanfaatan dengan mengurangi mismatch
- d) Menjadi komlemen dari pendidikan formal
- e) Membantu daya beli masyarakat yang berdampak penghidupannya akibat Covid.19

5. Tahapan Dalam mengikuti Kartu Pra Kerja

- a) Pendaftaran – Masuk ke situ prakerja.go.id dan buat akun dengan data diri

- b) Seleksi – Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar untuk bisa bergabung ke gelombang pendaftaran dan tunggu pengumuman hasilnya.
- c) Pilih pelatihan – Pilih Pelatihan di mitra platform digital resmi dan bayar dengan karu Pra Kerja.
- d) Ikuti pelatihan – Selesaikan pelatihan online dan dapatkab sertifikat elektronik.
- e) Beri ulasan dan rating – Berikan ulasan dan rating terhadap pelatihan
- f) Insentif pasca pelatihan – Dapat insentif Rp 600 ribu/bulan selama 4 bulan setelah menyelesaikan pelatihan.
- g) Insentif pasca survey kekerjaan – Isi 3 survey yang diberikan pasca pelatihan dan dapatkan insentif Rp 50 ribu untuk setiap surveynya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Medan.

Zaman dahulu kota Medan dikenal dengan Tanah Deli dan keadaan tanahnya rawa-rawa kurang lebih 4000 ha. Beberapa sungai melintasi kota Medan ini semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah sei Deli, sei Babura, sei Sikaming, sei Denai, sei Putih, sei Badrah, sei Belawan, sei Sulung-saling/ sei Kera.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari sungai ular (Deli Serdang) sampai ke sungai Wampu di Langkat sedangkan kesultanan Deli yang berkuasa saat itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah di antara dua sungai tersebut.²² Kediaman Sultan Deli disebut Kota matsum dan pusat pemerintahan Kesultanan Deli disebut Kota Maimun.²³

B. Letak Geografis Kota Medan.

Kota Medan terletak antara 2°.27'-2°.47' Lintang Utara, 98°.35'-98°.44' Bujur Timur. Kota Medan 2,5-37,5 meter diatas permukaan laut. Batas kota Medan sebelah utara , selatan barat dan timur dengan kabupaten Deli Serdang.²⁴

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 daerah tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km². Kota ini merupakan pusat pemerintahan daerah tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur sebagaimana pada tabel berikut :

²² Badan Pusat Statistika Kota Medan, Medan Dalam Angka (Medan in Figs), 2011, h.XIIV

²³ Timbul Siregar, Sejarah Kota Medan, Yayasan Pembina Jiwa Pancasila ,1990,h.21

²⁴ Badan Pusat Statistika Kota Medan, Medan Dalam Angka (Medan in Figs),2008,h.2.

Tabel 1

Batas wilayah Kota Medan

No	Arah	Berbatasan dengan
1.	Sebelah Utara	Kab. Deli Serdang
2.	Sebelah Selatan	Kab. Deli Serdang
3.	Sebelah Barat	Kab. Deli Serdang
4.	Sebelah Timur	Kab. Deli Serdang

Sumber: Data Badan Statistik Kota Medan 2011.

Sebagian besar wilayah kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu sungau Babura dan sungai Deli. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut stasiun Polonia pada tahun 2011 berkisar antara 23,2° C-24,2°C dengan suhu maksimum berkisar antara 31,6°C - 35,8°C dan suhu maksimum berkisar 29,1°C – 32,9°C.²⁵

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2019 penduduk kota Medan luas kecamatan, kepadatan penduduk dirinci berdasarkan sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah penduduk, luas kecamatan, kepadatan penduduk pr km

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Pendapatan Penduduk per Km ²
1	Medan Tuntungan	87939	20,68	4252
2	Medan Johor	136069	14,58	9333
3	Medan Amplas	129323	11,19	11557
4	Medan Denai	147981	9,05	16351

²⁵ Ibid, h.2.

5	Medan Area	99993	5,52	18115
6	Medan Kota	75153	5,27	14261
7	Medan Maimun	41092	2,98	13789
8	Medan Polonia	57501	9,01	6382
9	Medan Baru	40963	5,84	7014
10	Medan Selayang	109926	12,81	8581
11	Medan Sunggal	117189	15,44	7581
12	Medan Helvetia	153989	13,16	11701
13	Medan Petisah	63992	6,82	9383
14	Medan Barat	73424	5,33	13776
15	Medan Timur	112482	7,76	14495
16	Medan Perjuangan	96848	4,09	23679
17	Medan Tembung	138884	7,99	17382
18	Medan Deli	188807	20,84	9060
19	Medan Labuhan	120861	36,67	3296
20	Medan Marelan	172456	23,82	7240
21	Medan Belawan	99273	36,25	3782
Jumlah		2264145	265,10	8541

Sumber: Data badan statistika kota Medan 2019.

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk yang menepati porsi jumlah terbesar adalah Kecamatan Medan Deli.

C. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Denai

Kecamatan Medan Denai adalah Daerah Pinggiran yang terletak dikawasan bagian Selatan dari Kota Medan daerah ini berbatasan dengan Kecamatan Medan Amplas di sebelah selatan, Kecamatan Medan Tembung di sebelah Utara, Kecamatan Medan Area di sebelah Barat, dan Kabupaten Deli Serdang disebelah Timur. Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu Kecamatan di Kota Medan yang mempunyai Luas sekitar 9,91 km². Jarak Kantor Kecamatan ke Kantor Walikota Medan yaitu sekitar 8 km.

Dari Enam Kelurahan di Kecamatan Medan Denai, kelurahan Binjai memiliki Luas wilayah yang terluas sebesar 4,14 km² sedangkan Kelurahan Tegal Sari Mandala I mempunyai luas terkecil yakni 0,50 km².

Ditinjau dari jarak Kantor Kelurahan dengan Kantor Kecamatan , Kantor Kelurahan Medan Tenggara memiliki jarak terjauh dari kantor Kecamatan Medan Denai yaitu sekitar 3 km sedangkan Kantor Kelurahan Tegal Sari Mandala I sekitar 0,5 dari Kantor Kecamatan Medan Denai.

Daftar Nama Camat yang Pernah Memimpin di Kecamatan Medan Denai

Tabel 3

No	Nama Camat
1.	Waldimar Aritonang
2.	Drs. Bs. Parlaungan
3.	Drs. Nasrun Lubis
4.	Drs. Kadir Paruhum
5.	Drs. Irwan Efendi Lubis
6.	Drs. Haris Fadillah
7.	Drs. Darussalam
8.	Drs. OK Zulfi
9.	Drs. Nurly
10.	Dra. Edliaty Siregar
11.	Drs. Edi Mulia Matondang
12.	Hendra Asmilan , S.IP,M.AP
13.	

D. Keadaan Geografis

Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu Kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 9,911 Km². Jarak Kantor Kecamatan ke Kantor

Walikota Medan yaitu sekitar 8 Km. Adapaun wilayah Kecamatan Medan Denai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4

No	Arah	Berbatasan dengan
1.	Sebelah Utara	Kecamatan Medan Tembung
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Medan Area
3.	Sebelah Barat	Kab. Deli Serdang
4.	Sebelah Timur	Kecamatan Medan Amplas

Luas Wilayah Dirinci Per Kelurahan Di Kecamatan Medan Denai

No.	Kelurahan	Luas (Km ²)	Presentasi Terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Tegal Sari Mandala I	0,50	0,05
2	Tegal Sari Mandala II	1,00	0,01
3	Tegal Sari Mandala III	1,25	0,13
4	Denai	1,30	0,14
5	Binjai	4,14	0,46
6	Medan Tenggara	3,00	0,33
JUMLAH		11,19	100,00

Sumber Data : Kasubbag Umum Kecamatan Medan Denai.

E. Demografi Kecamatan Medan Denai

Salah satu tugas Camat, Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah melayani dalam bidang pemerintah, salah satunya adalah pelayanan KTP dan KK secara grafis sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Kependudukan Nomor : 24 Tahun 3013 Tentang Perubahan Atas Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini, Kecamatan telah mendata masyarakat yang telah datang dan mengurus KTP dan KK di Kecamatan Medan Denai .

Data Penduduk merupakan salah satu data pokok Dalam perencanaan Pembangunan, karena penduduk merupakan objek Pembangunan. Adapun data Kependudukan Kecamatan Medan Denai telah secara utuh melaksanakannya terhadap warga masyarakat khususnya bagi yangtelah mendaftar sebagai penduduk dikecamatan Medan Denai. Sesuai dengan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dapat di lihat tabel jumlah warga di Kecamatan Medan Denai yang terdaftar memiliki Kartu Keluarga sebagai berikut :

Tabel 5. Data Penduduk Berdasarkan Kartu Keluarga

No.	Kelurahan	Tahun 2019 (Kondisi s/d April 2020)	
		Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Tegal Sari Mandala I	3.720	15.230
2.	Tegal Sari Mandala II	7.941	31.441
3.	Tegal Sari Mandala III	11.982	47.655
4.	Denai	4.167	16.371
5.	Binjai	13.361	53.179
6.	Medan Tenggara	5.721	22.671
JUMLAH		46.891	186.5547

Tabel 6

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Kelurahan	Tahun 2018		Tahun 2019	
		L	P	L	P

1.	Tegal Sari Mandala I	7.364	7.544	7.256	7.424
2.	Tegal Sari Mandala II	14.882	15.721	15.503	15.868
3.	Tegal Sari Mandala III	21.824	26.012	21.678	25.888
4.	Denai	8.127	7.863	7.984	8.284
5.	Binjai	27.175	25.982	27.147	25.902
6.	Medan Tenggara	11.633	10.521	11.704	10.803
	JUMLAH	93.435	91.005	91.272	94.169

Sumber Data : Kasubbag Umum Kecamatan Medan Denai.

F. Visi dan Misi

A. Visi Kantor Kecamatan Medan Denai

Adapun Visi Kecamatan Medan Denai adalah **“Kecamatan Medan Denai Nyaman, peduli, pelayanan prima, berdaya saing tinggi, serta profesional dalam mewujudkan Medan sebagai Kota Metropolitan, khususnya Kecamatan Medan”**.

B. Misi Kantor Kecamatan Medan Denai

Untuk mewujudkan Misi ini Kecamatan Medan Denai merumuskan misinya adalah:

1. Pelayanan Prima pada Masyarakat.
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur kecamatan Medan Denai.
3. Mewujudkan Medan sebagai Kota Metropolitan yang Nyaman, Berdaya saing, dan Sejahtera.
4. Memerdayakan Masyarakat yang Optimal dalam Pembangunan.

Dengan terwujudnya Visi dan Misi Kecamatan Medan Denai maka telah mendukung kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan sesuai dengan Motto Kota Medan yaitu :

"Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.

Adapun Motto Pelayanan Kecamatan Medan Denai yaitu kami hadir melayani seluruh warga dengan *SAYANG* yaitu:

S : *SENYUM*
A : *AMANA*
Y : *YAKIN*
A : *AKUNTABEL*
N : *NIAT BAIK*
G : *GRATIS*

Tabel 7

Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Medan Denai

Unit	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
Kecamatan Medan Denai	-	10	22	1	33

Sumber Data: Kasubbag Umum Kecamatan Medan Denai

Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Camat Medan Denai mempunyai beragam tingkat pendidikan yang berbeda-beda, ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 8

Data Pegawai Kecamatan Medan Denai Menurut Tingkat Pendidik

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)
----	------------------	----------------

1	Pasca Sarjana	1
2.	Sarjana	18
3.	Akademi	3
4.	SLTA	11
5.	SLTP	-
	Jumlah	33

Sumber Data: Kasubbag Umum Kecamatan Medan Denai

G. Kedudukan Dan Tugas Kecamatan Medan Denai

Bagian untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Melaluistruktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisien dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan. tercapai. suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan atau kelompok yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, Struktur organisasi di perlukan untuk membedakan tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara setiap pegawai.

1. Camat
2. Sekretaris
3. Sub Bagian Umum
4. Sub Bagian Keuangan
5. Sub Bagian perencanaan Program
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Kesejahteraan
8. Seksi Sarana Dan Prasarana
9. Seksi Ketenraman dan Ketertiban

Pembinaan UMKM

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup warga Negara Republik Indonesia terutama bagi para wirausaha yang ekonominya lemah peran serta masyarakat dapat digerakkan melalui bidang pembangunan peningkatan kualitas bagi para Wirausaha ekonomi khususnya pemerintah dapat memberikan kemudahan kepada para wirausaha yang dapat mengembangkan dan meningkatkan taraf hidupnya.

Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui program Nasional Pemberdayaan masyarakat atau program penanggulangan kemiskinan Perkotaan melalui dana Bergilir, Bantuan sosial,serta Pembangunan jalan setapak. Penyelenggaran kegiatan program nasional Pemberdayaan Masyarakat atau Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sudah terlaksanakan dengan baik (Data Terlampir).

Tabel 9

Daftar UMKM di Kecamatan Medan Denai Tahun 2019-2020

No.	Nama Pengusaha UMKM	Usaha	Alamat
1.	Yosri Juwita	Klontong	Jalan Raya Menteng
2.	Harliadi Lubis	Warung Kopi	Jalan Raya Menteng
3.	Nurdin Nasution	Servis Elektronik	Jl. T. Bongkar IX
4.	Agustina	Servis Elektronik	Jl. Raya Menteng
5.	Jhomi Marpaung SH	Jual Buah	Jl. Raya Menteng
6.	Wahidin Situmeang	Billiard	Jl. Raya Menteng
7.	Septiana Marpaung	Klontong	Jl. Air Bersih
8.	Justin Simbolon	Jualan Pisang	Jl. T Bongkar IV
9.	Sudaryatni	Makanan Ringan	Jl. T Bongkar X
10.	Drs. Azwir	Menyewa alat Pesta	Jl. T Bongkar X
11.	Triastati	Menjual Kue	Jl. Jermal VII
12.	Togar Sihombing	Menjual Bahan Bangunan	Jl. Keramat Indah

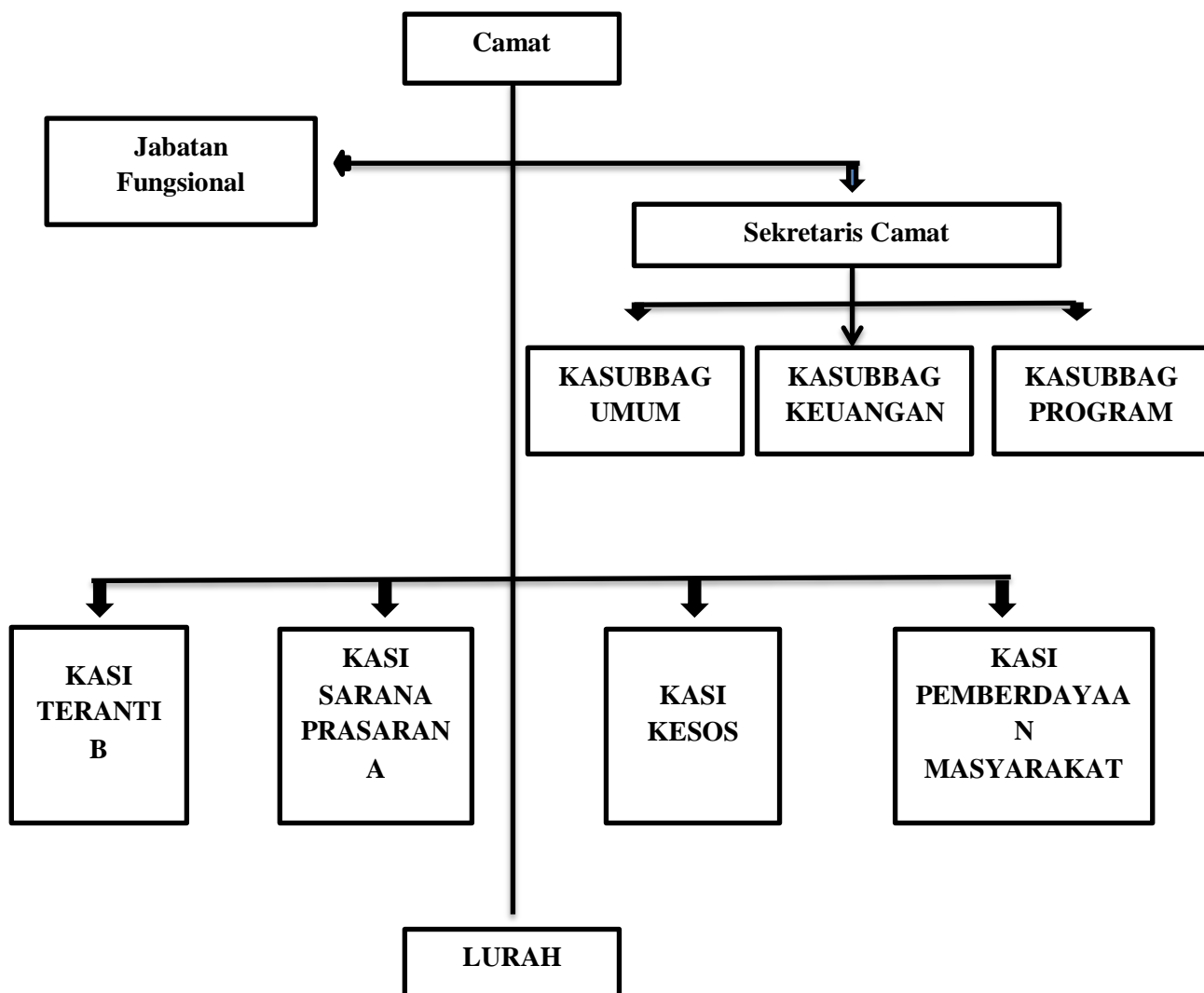
13.	Sri Wahyuni	Menjahit Pakaian	Jl. Jermal VIII
14.	Ricky Djunaidi	Menjual Pakaian	Jl. Denai
15.	Rins Juliati Simatupang	Jual Seprai, sajadah	Jl. Flamboyan
16.	Kasmiati	Menjual Sajadah Ulos	Jl Bromo Gg Jermal
17.	Rences Adelenia	Dagang	Jl. Air Bersih
18.	Maro;obsen	Jual Ikan Nila	Jl. Air Bersih
19.	Agus Saleh	Sepatu	Jl. Ikhlas
20.	Rizka Yulia	Bordir	Jl. Bromo Gg. Bahagia
21.	Marben Sianipar	Jualan Semangka	Jl. Jermal VII
22.	April Sitepu	Laudry	Jl. Raya Menteng
23.	Hilda Nasution	Pakaian dan Sepatu	Jl. Komplek Menteng
24.	Daniel Sidauruk	Toko Klontong	Jl, Raya Menteng
25.	Dermauli Napitupulu	Pedagang Bawang	Jl. Raya Menteng
26.	Ddok Hari Angkasa	Jual Minyak Rambur	Jl Bromo
27.	M. Syafruddin	Usaha Rumah Gorden	Jl. P Denai
28.	Judo Sitanggang	Grosir	Jl. P Denai
29.	Helena Matondang	Refleksi dan Salon	Jl. Nuri
30.	Robinson Nababan	Penampung Kemiri	Jl Air Bersih
31.	Anjek	Kedai Nasi	Jl. Jendral A Tahir
32.	Dei An	Jualan Jamu	Jl. Menteng VII
33.	Rahmah Puspita	Kedai Kopi	Jl Menteng VII
34.	Susilawati	Burger dan Roti Bakar	Jl. Menteng VII
35.	Gusfianty Lubis	Cattering	Jl. Menteng VII
36.	Syahrial Effendi	Dagang Pakaian	Jl. Menteng VII
37.	Nuraini	Jual Ayam Potong	Jl. Rawa Cangkuk III
38.	Rahmadayani	Penjual jajan Anak	Jl Rawa
39.	M. Parlindungan Lubis	Ayam Penyet	Jl. Perisai Pribumi
40.	Novika	Menjual Alat Pertanian	Jl. Menteng Indah
41.	Azwarni	Berjualan baju	Jalan Jermal XI
42.	Maringan Velentino S	Jual Pakaian	Pasar King Sukarame
43.	Nurmala Tampubolon	Bengkel Motor	Jl. Pelajar Timur

44.	Evi Ramli	Kerudung	Jl. Raya Menteng
45.	Judo Sitanggung	Konveksi Sepatu	Jl. Sepakat
46.	Yuliana	Bordir	Jalan Bromo
47.	Kasmiati	Kerajinan Sepatu	Jl. Selam

H. Bagan Struktur Organisasi Di Kantor Kecamatan Medan Denai

Bagan 1

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Denai 2020



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis membahas serta menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data dan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait yang akan menjawab pertanyaan sesuai permasalahan penelitian dan kemudian ditarik atau kesimpulan. Analisa ini terfokus pada Kecamatan Medan Denai terkait Program Pra Kerja. Penulis sebelumnya melakukan pengumpulan data dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kemudian melakukan proses wawancara. Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri atas 4 orang dari peserta yang mengikuti pelatihan Program Kartu Pra Kerja.

Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 3 Agustus 2021 di Kecamatan Medan Denai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian serta data-data yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Data –data tersebut berupa jawaban dan pernyataan dari narasumber yang nantinya akan dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh seseorang kepada informan untuk memperoleh suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan secara

terpimpin yaitu pewawancara sebelumnya sudah mempersiapkan draft pertanyaan- pertanyaan secara jelas dan lengkap yang akan ditanyakan kepada informan. Adapun hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Agar bisa Mendapatkan/ Terdaftar Dalam Program Kartu Pra Kerja

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB dengan bapak Nugraha selaku wiraswasta yang lulus pra kerja gelombang ke lima. Beliau mengatakan syarat mendaftarkan pra kerja hanya KTP, No Handphone dan juga Email itu saja tetapi memakai kartu penduduk yang asli, setelah itu data diri di input di aplikasi atau website. Kemudian ada beberapa kendala seperti memasukkan foto KTP jika meng unggah filenya gagal maka di ulang kembali dan foto KTP harus jelas gambar juga tulisannya dan file harus sebesar 2 MB, setelah itu adanya keterangan sedang di proses yang dulu sebelumnya diganti menjadi evaluasi kata seperti itu seakan akan ada peran manusia didalamnya padahal yang beroperasi di dalamnya adalah sistem. Untuk Program Kartu Pra Kerja itu sendiri sangat banyak yang ikut mendaftar dari gelombang pertama sampai gelombang ke lima saya baru lolos di gelombang ke 5 nya.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Kamis 5 Agustus 2021 pukul 15.42, dengan Fahri selaku orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), beliau mengatakan syarat untuk mendaftarkan Pra Kerja menggunakan E-KTP, nomor Rekening, dan nomor hp yang aktif dan beberapa

kendala disistem jaringan yang eror dan begitu banyak nya antusias masyarakat yang mendaftar dan menerima Kartu Pra Kerja.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan Pada Kamis 5 Agustus 2021 pukul :14.59 dengan Kak Windy selaku Ibu Rumah Tangga beliau mengatakan bahwa untuk mendaftarkan Kartu Pra Kerja hanya KTP saja, dan untuk Kendala saat mendaftarkan diri untuk Program Kartu Pra Kerja tersebut beliau mengatakan tidak ada kendala selama ini lancar-lancar saja dan untuk antusias masyarakat yang begitu banyak karena dana insentif yang keluar dapat membantu Prekonomian Rumah tangga khususnya saya sebagai ibu rumah tangga.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at 6 Agustus 2021 pukul 12: 21 dengan Trisna selaku Wiraswasta beliau mengatakan Syarat untuk mendaftar Pra Kerja yaitu harus memiliki KTP, kendala dalam pendaftaran Program Kartu Pra Kerja bermasalah di jaringan dikarenakan proses pendaftaran online, dan untuk antusias masyarakat itu sendiri banyak sekali yang mendaftar tetapi tidak seluruh yang mendaftar itu akan lolos saya berharap kedepannya yang mendaftar semua akan lolos karena Program ini di tujukan untuk orang yang terkena Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK).

B. Bagaimana Efektifitas bagi Masyarakat yang sudah mendapatkan Program Kartu Pra-Kerja

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 2 Agustus 2021 Pukul 17.00 WIB dengan bapak Nugraha selaku Wiraswasta. Beliau mengatakan Peserta yang mendaftar Pra Kerja ketika lolos ada yang

namanya pelatihan uamh bantuan yang berupa subsidi pelatihan non tunai sebesar 1 Juta Rupiah yang dapat digunakan untuk mengikuti pelatihan online contohnya pelatihan seperti penjualan, pemasaran, gaya hidup dan pelatihan tersebut sesuai dengan ujian sebelum kita mendaftarkan dan dinyatakan lolos di gelombang tersebut. Kekurangan dari Kartu Pra Kerja itu seperti proses pendaftaran yang sulit terkait mengunggah foto KTP dan pas Photo, dari survei penjawaban soal yang dibutuhkan 60 menit waktu yang sangat singkat, kelebihan Kartu Pra Kerja seperti mendapatkan insentif bulanan sekitar 3.500.000 akan tetapi 1.000.000 tidak dapat diuangkan karena digunakan untuk pelatihan dari lembaga mitra pra kerja, kemudian dari pelatihan tersebut bertambahnya Peningkatan Keterampilan agar lebih matang lagi dan juga sebagai pelengkap pendidikan formal. Pra Kerja ini kurang Efektif karena program ini dilakukan pelatihan saja tidak ada arahan untuk mendapatkan pekerjaan, karena sebelumnya menawarkan pelatihan, pemerintah tidak mengumumkan industri spesifik seperti apa yang menjadi unggulan, jadi menurut saya kurang efektif dan tidak bisa menurunkan angka pengangguran untuk Program ini.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada Kamis 5 Agustus 2021 pukul 15.43 dengan Fahri selaku orang yang terkena Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), beliau mengatakan bahwa pelatihan yang diikutinya pelatihan Tata boga dan pembuatan jaringan, kemudian kelebihan dari program pra kerja ini adalah di ujian dan pelatihannya sedangkan kelebihannya secara ekonomi ya membantu secara ekonomi. Dan program Kartu Pra Kerja untuk saat ini kurang efektif.

Kemudian wawancara yang dilakukan pada Kamis 5 Agustus 2021 pukul 14.59 dengan Windy sebagai Ibu Rumah Tangga, beliau mengatakan bahwa ada pelatihan setelah program Kartu Pra Kerja itu kalau saya sendiri Tata Boga, kelebihan Kartu Pra Kerja ini adalah setiap bulannya mendapatkan dana insentif dari program Kartu Pra Kerja ini, dan kekurangannya saat ini tidak ada. Untuk Program Kartu Pra Kerja tersebut kurang efektif karena bagi saya itu hanya iseng-iseng berhadiah bagi orang yang beruntung saja mendapatkannya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada Jumat 6 Agustus pukul 12:31 dengan Trisna sebagai Wiraswasta, beliau mengatakan bahwa bahwa pelatihan itu ada pelatihan dilakukan setelah kita dinyatakan lulus di Program Pra Kerja ini, pelatihan ini seperti wirausaha, Tata Boga, atau sebagainya, kelebihan dari Program Kartu Pra Kerja ini ya seperti membantu keuangan masyarakat yang belum bekerja dan masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pandemi ini, untuk efektifnya Program ini menurut saya sangat Efektif ya bagi saya untuk membantu keuangan pada masa sekarang ini.

C. Bagaimana Pengawasan Pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan) Terhadap Masyarakat yang Telah Mendapatkan Program Pra Kerja.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pada pukul 17.00 dengan bapak Nugraha selaku Wiraswasta yang lulus Pra Kerja gelombang ke lima. Beliau mengatakan pengawasan bagi pemerintah untuk menangani Program Pra Kerja ini tidak ada karena semua data yang kita input di website atau aplikasi sudah seleksi otomatis, dan seharusnya

pemerintah (dinas Ketenagakerjaan) tirun langsung untuk mengatasi Program ini agar pemerintah tau apakah dana yang di tuju sudah tepat apa belum, dan ketika ada yang menyalahgunakan program ini adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar Program Pra Kerja tetapi saya kurang tau Undang-Undangnya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada Kamis 5 Agustus 2021 pukul 15.43 dengan Fahri selaku orang yang terkena Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), untuk pengawasan dari dinas Ketenagakerjaan tidak ada, tetapi perlu dilakukan agar tau dimana dana yang keluar dan ada tranparansi uang pelatihan yang di non tunaikan sebesar satu juta rupiah, untuk sanksi pelanggaran ada di buat tetapi itu tidak baku atau sekedar formalitas saja.

Kemudian wawancara yang dilakukan pada Kamis 5 Agustus 2021 pukul 14.59 dengan Windy sebagai Ibu Rumah Tangga, beliau mengatakan tidak adanya pengawasan dari pemerintah karena ini sistem online, seharusnya pengawasan itu perlu dikarenakan uangan yang turun lumayan banyak agar masyarakat tau apakah dana itu tepat sasaran apa tidak. sanksi bagi yang melanggar ada tetapi saya juga kurang tau.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada Jumat 6 Agustus pukul 12:31 dengan Trisna sebagai Wiraswasta, beliau mengatakan bahwa pengawasan yang di berikan kepada pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan) ada tetapi tidak turun langsung seperti pengawasan pelatihan yang dilakukan, akan tetapi lebih baiknya pengawasan secara langsung sangatlah perlu karena banyak uang yang diturunkan kalau bisa libatkan pihak-pihak yang berwajib, untuk pelanggaran satu sanksi

beliau mengatakan kurang mengerti dengan sanksi tersebut yang seperti apa karena bagi yang tidak ikut pelatihan apakah namanya dicoret atau tidak.

2. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Agar bisa Mendaftarkan/ Terdaftar Dalam Program Kartu Pra Kerja

Pemerintah telah melaksanakan Program Kartu Pra Kerja sesuai dengan PERPRES NO. 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja. Masyarakat yang ingin mendaftar dan mendapatkan kartu Pra Kerja harus mempersiapkan berkas-berkas, syarat pendaftaran Kartu Pra-Kerja, menyediakan Handphone, akun email serta mengaktifkan uang elektronik Peserta yang ikut mendaftar dalam melaksanakan program kartu pra kerja tersebut memiliki kendala dalam melaksanakan. Untuk peserta yang mendaftar memiliki kendala yang dialami yaitu, tidak kondusif pada saat pendaftaran, karena banyaknya pengunjung yang membukakan halaman web sehingga menjadi eror dan juga lambat, dan itu jadi penentu oleh peserta yang mendaftar terhadap kelulusan Program Kartu Pra Kerja dan sebagian masyarakat ada yang tidak bisa menggunakan handphone android. Dan ada juga penundaan jadwal insentif, sinyal dan kelas Pra Kerja harus sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki

Solusi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan atau kendala tersebut yaitu dengan tetap memperbaiki sistem website dan menghubungi customer service jika mengalami penundaan insentif, mencari kembali kelas sesuai dengan minat dan bakat.

Partisipasi masyarakat terhadap Program kartu Pra kerja sangat antusias. Selain membantu perekonomian, juga meningkatkan skill.

Ada dua pengertian untuk istilah “program”. Program dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum

program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan “Program” apabila dikaitkan langsung dengan evaluasi program, maka program diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan pelaksanaan untuk mendapatkan dan terdaftar program pra kerja belum bisa dikatakan baik dan sempurna. Masih banyak peserta yang bingung pada saat mengikuti Program Kartu Pra Kerja, belum bisa merasakan pelayanan sistem yang baik dan masih banyak masyarakat yang belum tertarik untuk mengikuti Program Kartu Pra Kerja.

B. Bagaimana Efektivitas Bagi Masyarakat Yang Sudah Mendapatkan Program Kartu Pra Kerja

PERPRES No. 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden No. 36 Tahun 2020 tentang pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Pra Kerja telah memberikan kelebihan serta dampak bagi pemerintah daerah selaku pelaksana atau terkhusus bagi masyarakat yang menjadi target dalam pelaksanaan program tersebut. Kelebihan dari Program Kartu Pra kerja tersebut yaitu, merupakan sesuatu yang baru, masyarakat yang tidak mempunyai kegiatan di masa pandemi, terkhusus pekerja yang ter- PHK, jadi lebih produktif dan memiliki keahlian. Kemudian, memiliki mitra pelatihan yang banyak, akses pendaftaran yang mudah, cepat tanggap akan keluhan atau kendala yang dialami peserta, mendapat sertifikat setelah mengikuti pelatihan, yang dapat dijadikan pendukung pada saat mencari pekerjaan. Dan mendapatkan insentif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkhusus di masa Covid-19 ini.

Sedangkan kekurangan dari Program Kartu Pra kerja yaitu, tidak adanya transparansi atau keterbukaan dalam kelulusan, tidak ada sosialisasi dari pemerintah, jaringan webinar masih kurang lancar, tanggal pencairan lewat dari

jadwal yang telah ditentukan, pengguna dan pembelian kelas rumit, customer service Kartu Pra Kerja kurang responsif dan harga pelatihan yang tidak sesuai dengan materi pelatihan.

Selain itu yang dirasakan dari Program Pra Kerja tersebut yaitu perekonomian meningkat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam masa pandemi dan isolasi mandiri, masyarakat jadi lebih produktif, menambah ilmu serta skill dan modal untuk usaha yang didapatkan dari insentif.

Masyarakat berharap Program Kartu Pra Kerja kedepannya masih tetap lanjut. berjalan dengan baik dan adanya transparansi kelulusan. Kemudian harapan bagi masyarakat yang telah lolos Program Kartu Pra Kerja yaitu, agar menggunakan insentif dengan sebaik-baiknya, mengimplementasikan skill yang didapat untuk membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam mengelola program kartu Pra kerja sudah cukup baik dan semestinya, Dampak yang dirasakan masyarakat sebagai target sasaran program cukup efektif dan sangat signifikan dan masyarakat berharap program lanjut dan terbuka kembali di gelombang selanjutnya .

C. Bagaimana Pengawasan Pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan) Terhadap Masyarakat yang Telah Mendapatkan Program Kartu Pra Kerja.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan sebagian besar metode digital/ elektronik, karena hal tersebut dianggap efektif dan efisien terutama Dalam era Revolusi 4.0 saat ini. Pihak Dinas Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat Kota Medan dan menyebarkan Informasi melalui pembuatan Flyer dan Kartu Pra Kerja. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga mengirimkan kontak person kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam rangka media informasi bagi warga Kota Medan Khusus nya masyarakat Kecamatan Medan Denai dan menyebarluaskan informasi melalui media sosial seperti facebook, Instagram.

Pengawasan Perlu dilakukan karena, agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, pada saat dan setelah mendaftar Program Kartu Pra Kerja dan bagaimana cara menggunakan insentif yang diberikan. Dengan Adanya pengawasan ini. Di harapkan Program Kartu Pra Kerja bukan hanya sebagai program yang sekedar dijalankan. Tapi juga sebagai ruang gerak bagi masyarakatnya yang mau meningkatkan keterampilan dan modal usaha. Tetapi ada masyarakat yang mengatakan bahwa pengawasan tidak ada dari Dinas Ketenagakerjaan secara langsung. Di karenakan sistem nya online tetapi masyarakat mengatakan bahwa perlu nya pengawasan dan transparansi dana pelatihan yang sudah di tetapkan senilai 1 juta rupiah sebagai dana non tunai.

Dan ada beberapa sanksi yang di berikan kepada peserta yang melanggar sistem Program Pra Kerja Sanksi tersebut telah diatur di Dalam pasal 31 Cperpres yang baru, dimana disebutkan penerima Kartu Pra Kerjs yang tidak memenuhi ketentuan Dalam pasal 3 dan telah menerima bantuan biaya pelatihan wajib mengambil pelatihan atau insentif tersbut pada negara. Peserta diberi waktu 60 hari, jika tidak Akan dilakukan gugatan ganti rugi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan pengawasan yang di lakukan pemerintah Dinas Ketenagakerjaan tidak ada Dalam pengelolaan Program Kartu Pra Kerja, dan pengawasan yang di perlukan belum terlaksanakan dengan baik. Dan beberapa sanksi yang diberikan untuk peserta yang mengalami kecurangan belum ada dilakukan sesuai sistem dan undang-undang yang berlaku.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan penulis tentang Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah telah melaksanakan Program Kartu Pra Kerja sesuai dengan PERPRES NO. 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja. Masyarakat yang ingin mendaftarkan dan mendapatkan kartu Pra Kerja harus mempersiapkan berkas-berkas, syarat pendaftarab Kartu Pra-Kerja, menyediakan Handphone, akun email serta mengaktifkan uang elektronik Peserta yang ikut mendaftar dalam melaksanakan program kartu pra kerja tersebut memiliki kendala dalam melaksanakan. Untuk peserta yang mendaftar memiliki kendala yang dialami yaitu, tidak kondusif pada saat pendaftaran, karena banyaknya pengunjung yang membukan halaman web sehingga menjadi eror dan juga lambat, dan itu jadi penentu oleh peserta yang mendaftar terhadap kelulusan Program Kartu Pra Kerja dan sebagian masyarakat ada yang tidak bisa menggunakan handphone android.
2. Program Pra Kerja ini cukup efektif Masyarakat berharap Program Kartu Pra Kerja kedepannya masih tetap lanjut. berjalan dengan baik dan adanya transparansi kelulusan. Kemudian harapan bagi masyarakat yang telah lolos Program Kartu Pra Kerja yaitu, agar menggunakan insentif dengan sebaik-baiknya, mengimplementasikan skil yang didapat untuk membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru. Dampak yang dirasakan masyarkat sebagai target sasaran program cukup efektif dan sangat

signifikan dan masyarakat berharap program lanjut dan terbuka kembali di gelombang selanjutnya.

3. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan sebagian besar metode digital/ elektronik, karena hal tersebut dianggap efektif dan efisien terutama Dalam era Revolusi 4.0 saat ini. Pihak Dinas Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat Kota Medan dan menyebarkan Informasi melalui pembuatan Flayer dan Kartu Pra Kerja. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga mengirimkan kontak person kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam rangka media informasi bagi warga Kota Medan Khusus nya masyarakat Kecamatan Medan Denai dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Dinas Ketenagakerjaan tidak ada Dalam pengelolaan Program Kartu Pra Kerja, dan pengawasan yang di perlukan belum terlaksanakan dengan baik. Dan beberapa sanksi yang diberikan untuk peserta yang mengalami kecurangan belum ada dilakukan sesuai sistem dan undang-undang yang berlaku.

B.Saran

Sebagai penulis dari Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja),

1. Dalam hal ini untuk memperbaiki sistem jaringan internet yang sering sekali eror akibat banyak pengguna website www.prakerja.co.id.
2. Sebaiknya adanya transparansi uang pelatihan yang di potong untuk digunakan dalam pelatihan tersebut.
3. Pengawasan yang di lakukan pemerintah Dinas Ketenagakerjaan tidak ada dalam pengelolaan Program Kartu Pra Kerja, dan pengawasan yang di perlukan belum terlaksanakan dengan baik. Dan beberapa sanksi yang

diberikan untuk peserta yang mengalami kecurangan belum ada dilakukan sesuai sistem dan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chandra HeryPindarti,1998. *Faktor-Faktor Strategi Positioning Dalam Pemasart Realstat*. Surabaya:Graha Ilmu.

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 1996. Surabaya: CV.Mahkota, Edisi Revisi.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU. 2017 , “*Metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Menulis Skripsi*” Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara,

Gibb,H.A.R.1960. *The Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J.Brill

Hassan. S. Hamid, 2012 *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Hourani, Albert. 2004. *Pemikiran Liberaldi Dunia Arab*. Bandung: Mizan
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4993042/peserta-kartu-prakerja-dipilih-acak-yakin-tepat-sasaran>.

Ibnu Syarif , Mujar,dan Zada Khamanil, 2008 *Fiqh Siyasah*. Jakarta Erlangga 2008

Lexy J. Moleong. 2017. *Metodelogi Peelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Bradey,Laurie, 1983 *Curriculum Development In Australia*, Sidney Prentice Hall of Australian PTY. LTD.

MardapiDjemari,2012.*Pengukuran, Penilaian, danEvaluasi Pendidikan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Muhammad iqbal. 2017” *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Jakarta:

N.Gregory Mankiw, 2009, *Mikroekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Rapung Samuddin. 2013 *Fiqh Demokrasi*, Jakarta, Gozian Press.

Rianto Adi.2010 ,” *Metodologi Penelitan Sosial dan Hukum* “. Jakarta : Granit ,
Sendjun H Manulang, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Ketetanegaraan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Sukirno Sadono,2013, *Mikroekonomi,Teori Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafinfo Persada.

Taimiyah, Ibnu. 204 .*Tugas Negara Menurut Ibn Taimiyah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

[ttps://m.liputan6.com/bisnis/read/4219869/daftar-1139-hotel-tutup-akibat-corona-beberapa-phk-karyawan](https://m.liputan6.com/bisnis/read/4219869/daftar-1139-hotel-tutup-akibat-corona-beberapa-phk-karyawan)

Watni Marpaung. 2016 *Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Prena Damedia Group
Wirawan, 2011 *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, Jakarta Raja
Grafindo Persada.

B. INTERNET

BPS.go.id

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47520226>

[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-493002/corona-total-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan.](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-493002/corona-total-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan)

<https://www.merdeka.com/uang/mengupas-efektifitas-kartupraekerja-milik-jokowi-html>

<https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-77-warga-menilai-corona-ancam-penghasilan/5376217.html>

www.prakerja.co.id

C. Undang-Undang

UUD 1945

UU No. 25 Tahun 2009

PERPRES No. 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja.

D. Wawancara

Wawancara Pribadi dengan masyarakat yang sudah mendaftar dan lolos di Program Kartu Pra Kerja di Kecamatan Medan Denai

Draf Wawancara

Tinjauan terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu
pra kerja di Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Nama :

Jabatan :

Usia :

- A. Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan agar bisa mendapatkan / terdaftar Dalam program kartu pra kerja
 1. Apa saja syarat-syarat yang di perlukan untuk mendaftarkan kartu pra kerja?
 2. Apakah ada kendala dalam proses permohonan kartu pra kerja, dan apa solusinya?
 3. Bagaimana Antusias masyarakat dalam pendaftaran kartu prakerja?
- B. Bagaimana efektifitas bagi masyarakat yang sudah mendapatkan program kartu pra kerja
 1. Apakah masyarakat yang mendapatkan kartu prakerja mengikuti pelatihan ? jika ada pelatihan seperti apa yang digunakan sebagai pelatihan peningkatan kompetensi ?
 2. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan kartu pra kerja?
 3. Menurut bapak/ibu apakah program kartu prakerja ini sangat efektif atau kurang efektif pada masyarakat?
- C. Bagaimana pengawasan pemerintah (dinas Ketenagakerjaan) terhadap masyarakat yang telah mendapatkan program kartu prakerja

1. Adakah pengawasan terhadap peserta yang menerima program kartu prakerja? jika ada pengawasan seperti apa yang dilakukan?
2. Menurut bapak/ibu seberapa perlunya dilakukan pengawasan kepada peserta penerima program kartu pra kerja?
3. Apakah ada sanksi dalam hal pelanggaran peserta pada program kartu pra kerja ?



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail: balitbangmedan@yahoo.co.id. Website: balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/2007/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nomor: B.1583/FSH.I/PP.00.9/7/2021. Tanggal: 08 Juli 2021. Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Dinda Siti Rachmah,
NIM : 0203171008,
Prodi : Hukum Tatanegara(Siyasah).
Lokasi : 1.Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
2.Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
Judul : "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kecamatan Medan Denai Kota Medan(Evaluasi Perpres No.76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja)".
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email / balitbangmedan@yahoo.co.id.
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
3. Camat Medan Denai Kota Medan.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Bertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
 Jl. Pancasila No. 96 Telp. (061)-7322190
 MEDAN

Nomor : 070 / 467
 Lamp :
 Perihal : Izin Penelitian


Medan, 27 Juli 2021
 Kepada Yth :
 Bapak Camat Kecamatan Medan Denai
 di
Medan

1. Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070 /2807/Balitbang/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal seperti pokok surat di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : **Dinda Siti Rachmah**
 Lokasi : 1. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan
 2. Kecamatan Medan Denai Kota Medan
 Judul Penelitian : “ Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja) “
 Penanggung jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

2. Berkaitan dengan hal di atas, dengan ini di sampaikan bahwa kami tidak merasa keberatan untuk melakukan Izin Penelitian selama 1 (satu) bulan.
 3. Peserta yang melakukan kegiatan harus memenuhi ketentuan yang berlaku di wilayah Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
 4. Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

An. CAMAT MEDAN DENAI
 SEKAM


 YOGA BUDI PRATAMA IRAWAN. SSTP, Msi
 PENATA Tk. I
 NIP. 198504 19200412 1 001

,